

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang berhasil dikumpulkan, hasil pengolahan data dan pembahasan dari hasil pengolahan data. Sistematika pembahasan Bab ini terdiri dari populasi dan sampel penelitian, analisis data yang meliputi analisis statistik deskriptif, pengujian normalitas, pengujian multikolinieritas, pengujian heterokedastisitas, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

4.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2012. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kota dan Kabupaten di Wilayah Indonesia tahun 2010-2012. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 511, dengan jumlah 414 Kabupaten, dan 97 Kota.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Proposional Random Sampling*, dengan metode acak, dan dengan diambil secara sistematis. Pengambilan sampel kota dan kabupaten dimulai dari pulau Sumatra, Pulau Jawa, pulau Kalimantan, Pulau Bali, dan pulau Irian Jaya. Jadi setiap Kabupaten dan Kota mendapatkan peluang menjadi sampel. Dalam pengambilan jumlah sampel dengan rumus slovin untuk mendapatkan

jumlah sampel minimal. Jadi Total Kabupaten yang akan dilakukan penelitian berjumlah 68 Kabupaten dan 16 Kota.

Tabel 4.1
Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah kota dan kabupaten	Kabupaten	Kota
Kabupaten dan kota di wilayah Indonesia tahun 2010 -2012	511	414	97
Kabupaten dan kota yang akan dijadikan sampel	84	68	16

4.2 Deskriptif Statistik

Deskriptif statistik merupakan bagian dari analisis data yang memberikan gambaran awal setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan empat (4) variabel dalam menjelaskan deskriptif statistik, yang terdiri dari satu (1) variabel dependen dan empat (4) variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Gambaran atau deskriptif data dapat dilihat dari nilai rata-rata (*Mean*), maksimum, minimum, dan deviasi standar (*standard deviation*) dari setiap variabel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Descriptive Statistics

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	5.000.000.000,00	80.000.000.0000,00	72.700.000.000,00	92.080.000.000,00
PAJAK	600.000.000,00	500.000.000.000,00	27.300.000.000,00	61.910.000.000,00
RETRIBUSI	700.000.000,00	100.000.000.000,00	15.200.000.000,00	15.360.000.000,00
LABA_BUMD	50.000.000,00	50.000.000.000,00	4.620.000.000,00	5.600.000.000,00
LAIN_LAIN_PAD	1.000.000.000,00	700.000.000.000,00	29.500.000.000,00	52.310.000.000,00

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah untuk jangka waktu 2010-2012 yang memiliki nilai PAD terendah yaitu Kabupaten Pidie Jaya, dengan jumlah PAD sebesar Rp.5.000.000.000,00. Sedangkan jumlah PAD terbesar yaitu Kabupaten Toba Samosir dengan jumlah sebesar Rp.80.00.000.000,00. Dengan mean /rata-rata PAD setiap kota dan kabupaten sebesar Rp. 7.270.000.000,00. Nilai standar deviasi untuk Pendapatan Asli Daerah adalah Rp.92.080.000.000,00 nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *mean* tersebut menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki data yang bervariasi.

Untuk jumlah terendah dari pajak daerah tahun 2010-2012 yaitu di Kabupaten Sukamara, dengan jumlah sebesar Rp. 600.000.000,00. Sedangkan jumlah pajak daerah terbesar yaitu Kabupaten Bogor, dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000.000,00. Dengan mean/rata-rata pajak daerah

setiap Kota dan Kabupaten sebesar Rp. 27.300.000.000,00. Nilai standar deviasi untuk Pajak Daerah sebesar Rp. 61.910.000.000,00. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan *mean* tersebut menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki data yang bervariasi.

Untuk jumlah nilai terendah dari retribusi dalam waktu 2010-2012 yaitu Kabupaten Tulang Bawah, dengan jumlah sebesar Rp.700.000.000,00, sedangkan jumlah nilai terbesar dari retribusi sebesar Rp.100.000.000.000,00 yaitu Kabupaten Kendal. Dengan mean/rata-rata retribusi setiap Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia sebesar Rp. 15.200.000.000,00. Nilai untuk standar deviasi untuk retribusi daerah sebesar Rp. 15.360.000.000,00. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari *mean* tersebut menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki data yang bervariasi.

Untuk jumlah nilai terendah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2010-2012 sebesar Rp. 50.000.000,00 yaitu Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan jumlah nilai terbesar untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2010-2012 setiap Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia sebesar Rp. 50.000.000.000,00 yaitu Kabupaten Banjar. Dengan mean/rata-rata hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 4.620.000.000,00. Nilai standar deviasi untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.5.6000.000.000,00. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari *mean* tersebut menunjukkan bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki data yang bervariasi.

Untuk jumlah nilai terendah dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk waktu 2010-2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yaitu Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan jumlah nilai terbesar dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 70.000.000.000,00 yaitu Kabupaten Kendal, dengan mean/rata-rata lain-lain PAD yang sah Rp. 29.500.000.000,00. Nilai standar deviasi untuk lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 52.310.000.000,00. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dari *mean* tersebut menunjukkan bahwa variabel lain-lain PAD yang sah memiliki data yang bervariasi.

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan uji *kolmogorov-smirnov* dengan kaidah keputusan jika signifikan lebih dari $\alpha = 0,05$ maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

	PAD	PAJAK	RETRIBUSI	LABA_BUMD	LAIN_LAIN_PAD
Kolmogorov-Smirnov Z	3.656	5.290	2.833	3.953	4.666
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.3, pengujian menunjukkan variabel memiliki distribusi yang tidak normal, karena nilai signifikan kurang dari 5%, karena tidak diperoleh residual error yang berdistribusi normal maka dengan demikian selanjutnya diupayakan tindakan untuk menormalkan data,

yaitu dengan menghilangkan data-data yang diindikasikan sebagai *outlier*. Dalam penelitian ini untuk melihat data yang *outlier* dilakukan uji *casewise diagnostic*. Hasil pengujian normalitas setelah data *outlier* dikeluarkan diperoleh sebagaimana pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4.4
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov Smirnov Test

	PAD	PAJAK	RETRIBUSI	LABA_BUMD	LAIN_LAIN_PAD
Kolmogorov-Smirnov Z	3.647	5.205	2.765	3.968	3.185
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Pengujian *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan signifikansi pengujian sebesar 0,000, nilai signifikansi kurang dari 5% menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal. Pengujian terhadap uji normalitas data telah dilakukan dengan menunjukkan hasil bahwa data tidak terdistribusi normal walaupun telah dilakukan pembuangan data outlier, namun merujuk pada asumsi *central limit theorem* yang menyatakan bahwa untuk sampel yang besar terutama lebih dari 30 ($n > 30$), distribusi sampel telah dianggap normal. Hal ini menunjukkan walaupun dari pengujian asumsi klasik menunjukkan data berdistribusi tidak normal namun karena observasi lebih dari 30 maka data tersebut telah dianggap normal.

4.3.1.1 Uji Heteroskedastisitas

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji *glejser*. Uji *glejser*

dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai *absolut* residualnya. Berikut tampilan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji *glejser*.

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig	KETERANGAN
Pajak daerah	.947	.344	BEBAS HETEROKEDASTISITAS
Retribusi Daerah	-1.121	.264	BEBAS HETEROKEDASTISITAS
Laba BUMD	-.109	.913	BEBAS HETEROKEDASTISITAS
Lain-Lain PAD	-1.511	.132	BEBAS HETEROKEDASTISITAS

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Dari tabel diatas maka data dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah heteroskedasitas, hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5 dengan kesimpulan semua variabel bebas menunjukkan hasil pengujian yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut tidak terjadi heteroskedasitas.

4.3.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) pada model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance*. Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila VIF yang kurang dari 10 dan nilai *tolerance*

lebih dari 0,1. Hasil uji gejala multikolinearitas disajikan pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
PAJAK	.434	2.304	Tidak terjadi multikolinearitas
RETRIBUSI	.545	1.835	Tidak terjadi multikolinearitas
LABA_BUMD	.856	1.168	Tidak terjadi multikolinearitas
LAIN_LAIN_PAD	.665	1.504	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan pengujian diatas, semua variabel independen yang digunakan menunjukkan nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* > 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan.

4.3.1.3 Uji Autokorelasi

Adanya autokorelasi bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi berganda yaitu tidak adanya korelasi antara variabel tahun ini dengan variabel tahun sebelumnya, artinya jika ada korelasi maka dapat dikatakan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh kurang akurat. Hasil pengujian metode perhitungan durbin-watson disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	1.000	1.000	2.122E8	2.029

Data Sekunder diolah, 2014

Hasil pengujian dengan regresi model yang dapat dilihat pada tabel 4.7 dengan kesimpulan bahwa kesimpulan dw test untuk observasi (n) sebanyak 252, variabel independen (k) sebanyak 4 variabel, nilai *durbin-watson* dengan $\alpha=5\%$ diperoleh du sebesar 1,1495. Maka $du < dw < 4 - du$ ($1,1495 < 2.093 < 2,0995$) berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada data.

4.3.2 Analisis Regresi Linier

Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2011). Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi uji asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Hasil olahan data dengan bantuan SPSS 16.0.

4.3.2.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya, secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai

statistik F dan nilai koefisien determinasi (R^2). Hasil pengujian nilai statistik F dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	1.150E7	.000 ^a
Residual		
Total		

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengujian terhadap uji statistik F yang dilakukan dengan menggunakan variabel dependen Pendapatan Asli Daerah dan empat (4) variabel independennya yang terdiri Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh nilai F-hitung (F-statistik) sebesar 1.150, dan Probabilitas F (0,000) < nilai signifikan (Sig \leq 0,05) bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh simultan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Hal ini mengidentifikasi bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (fit) untuk digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis.

4.3.2.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan dari uji regresi terhadap model penelitian ini, diperoleh nilai adjusted R^2 yang dapat dilihat pada tabel 4.9:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1.000 ^a	1.000	1.000	2.122E8

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel 4.6, koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan dari uji regresi linier berganda terhadap model penelitian dengan menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 1.000 atau sebesar 100%. Dengan R^2 nilai 1.000 demikian dapat disimpulkan bahwa 100% pendapatan asli daerah mampu dijelaskan oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah.

4.3.2.3 Uji Signifikansi-t

Uji hipotesis menggunakan uji t yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Pajak, Retribusi Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD secara terpisah (parsial) berpengaruh pada PAD. Taraf nyata yang digunakan adalah 5 persen. Apabila tingkat signifikansi t lebih besar dari signifikansi = 0,05 maka hipotesis ditolak sebaliknya jika tingkat signifikansi t lebih kecil dari atau sama dengan signifikansi = 0,05 maka hipotesis diterima.

Tabel 4.10
Hasil Uji Signifikansi t

Variabel	B	T	Sig
PAJAK	1.000	3.023E3	.000
RETRIBUSI	1.001	834.072	.000
LABA BUMD	1.000	379.879	.000
LAIN-LAIN PAD	1.001	1.566E3	.000

Sumber: Data sekunder diolah, 2014

1. Dari hasil tabel 4.10 menunjukan Beta sebesar 1.000 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maksud dari nilai tersebut adalah setiap kenaikan 1% dari pajak daerah, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1.000 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis. Dengan demikian H1 dari penelitian ini bisa diterima.
2. Dari hasil tabel 4.10 menunjukan Beta sebesar 1.001 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maksud dari nilai tersebut adalah setiap kenaikan 1% dari retribusi daerah, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1.001 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis. Dengan demikian H2 dari penelitian ini bisa diterima.
3. Dari hasil tabel 4.10 menunjukan Beta sebesar 1.000 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maksud dari nilai tersebut adalah setiap kenaikan 1% dari laba BUMD, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1.000 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang

ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis. Dengan demikian H3 dari penelitian ini bisa diterima.

4. Dari hasil tabel 4.10 menunjukan Beta sebesar 1.001 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maksud dari nilai tersebut adalah setiap kenaikan 1% dari lain-lain PAD, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1.001 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis. Dengan demikian H4 dari penelitian ini bisa diterima.

Tabel 4.8
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

KODE	Hipotesis	Ket
H ₁	Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap PAD	Diterima
H ₂	Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap PAD	Diterima
H ₃	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif terhadap PAD	Diterima
H ₄	Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap PAD	Diterima

4.1.3 Perbandingan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap PAD antar Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia.

Kontribusi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Lain Lain PAD yang Sah terhadap PAD di wilayah Indonesia dari tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 4.11:

Tabel 4.11

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi daerah, Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD Terhadap PAD di Kota dan Kabupaten di wilayah Indonesia

KOMPONEN PAD	TAHUN		
	2010	2011	2012
PAJAK DAERAH	Rp 1.406.173.000	Rp.2.742.554.000	Rp.2.561.209.000
RETRIBUSI DAERAH	Rp 1.384.751.000	Rp.1.381.836.000	Rp.1.019.534.000
LABA BUMD	Rp. 331.217.000	Rp.419.053.000	.Rp.408.348.000
LAIN-LAIN PAD	Rp.1.955.762.000	Rp.2.528.242.000	Rp.2.261.279.000

Data sekunder diolah, 2014

Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD terhadap peningkatan PAD di setiap kota dan kabupaten di wilayah Indonesia berbeda-beda. Untuk kontribusi pajak daerah pada tahun 2010 mencapai Rp. 1.406.173.000, atau sebesar 28% dari total penerimaannya. Ditahun 2011 kontribusi pajak daerah mencapai Rp.2.742.554.000 atau sebesar 39% dari total penerimaannya. Ada kenaikan sebesar 11% dari tahun 2010 ke tahun 2011. Untuk tahun 2012 kontribusi pajak daerah sebesar Rp. 2.561.209.000 atau

sebesar 41% dari total penerimaannya. Ada kenaikan sebesar 2% dari tahun 2011 ke tahun 2012.

Pada kontribusi retribusi daerah pada kota dan kabupaten di wilayah Indonesia terhadap pendapatan asli daerah untuk tahun 2010 sebesar Rp.1.384.751.000 atau sebesar 27%. Untuk kontribusi retribusi pada tahun 2011 sebesar Rp.1.381.836.000 atau sebesar 20% dari total penerimaannya. Ada penurunan kontribusi retribusi untuk PAD dari tahun 2010-2011 sebesar 7%. Untuk tahun 2012 kontribusi retribusi untuk PAD sebesar Rp.1.019.534.000 atau sebesar 16% dari total penerimaannya. Ada penurunan kontribusi retribusi untuk PAD dari tahun 2010-2012 sebesar 4%.

Untuk kontribusi laba BUMD pada tahun 2010 mencapai Rp.331.217.000, atau sebesar 7% dari total penerimaannya. Ditahun 2011 kontribusi laba BUMD mencapai Rp.419.053.000 atau sebesar 8% dari total penerimaannya. Ada kenaikan sebesar 1% dari tahun 2010 ke tahun 2011. Untuk tahun 2012 kontribusi laba BUMD sebesar Rp.408.348.000 atau sebesar 7% dari total penerimaannya. Ada penurunan sebesar 1% dari total penerimaannya.

Untuk kontribusi lain-lain PAD pada tahun 2010 mencapai Rp.1.955.762.000 atau sebesar 39% dari total penerimaannya. Ditahun 2011 kontribusi lain-lain PAD mencapai Rp.2.528.242.000 atau sebesar 39% dari total penerimaannya. Untuk tahun 2012 kontribusi lain-lain PAD sebesar Rp.2.261.279.000 atau sebesar 40% dari total penerimaannya. Ada kenaikan sebesar 1% dari total penerimaannya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 16.0 terhadap 84 sampel didapatkan hasil Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan arah pengaruhnya positif. Ini berarti bahwa semakin tinggi Pajak Daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil uji dapat disimpulkan setiap kenaikan 1% dari pajak daerah, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1.000 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Dalam penelitian ini hasil kontribusi untuk pajak daerah terhadap PAD mengalami kenaikan.

Untuk tahun 2010 kontribusi pajak daerah sebesar 28% dari total penerimaannya, ditahun 2011 naik sebesar 39% dan ditahun 2012 naik sebesar 41%. Adanya peningkatan pajak daerah akan berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Marpen (2013) bahwa “penerimaan pajak daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah”.

4.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 16.0 terhadap 84 sampel menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan arah pengaruhnya positif. Ini berarti bahwa semakin tinggi Retribusi Daerah

maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil penelitian ini setiap kenaikan 1% dari retribusi daerah, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1.001 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah pada kota dan kabupaten di wilayah Indonesia pada tahun 2010 mencapai 27%, dari total penerimaannya ditahun 2011 mencapai 20% dari total penerimaannya, dan ditahun 2012 mencapai 16%. Adanya penurunan persentase retribusi daerah pada tahun 2011 dan ditahun 2012. Hal ini menyebabkan adanya penurunan pendapatan asli daerah pada kota dan kabupaten di wilayah Indonesia. Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Marpen (2013) bahwa “Penerimaan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah”.

4.2.3 Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 16.0 terhadap 84 sampel menunjukkan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Laba BUMD) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan arah pengaruhnya positif. Ini berarti bahwa semakin tinggi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(Laba BUMD) maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penelitian ini setiap kenaikan 1% dari laba BUMD, maka akan mengakibatkan kenaikan sebesar 1.000 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa laba BUMD berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah pada kota dan kabupaten di wilayah Indonesia pada waktu 2010 mencapai 7%, tahun 2011 mencapai 8%, dan tahun 2012 mencapai 7%. Adanya kenaikan 1% pada tahun 2011, dan kenaikan sebesar 1% pada tahun 2012. Kontribusi laba BUMD tidak terlalu signifikan di bandingkan dengan komponen PAD lainnya, dapat dilihat dari persentase kontribusinya yang di bawah 10%. Mungkin ini disebabkan kurangnya Perusahaan Daerah seperti PDAM, Perusahaan Perkreditan, dan Bank Pembangunan daerah masing-masing kota dan kabupaten di wilayah Indonesia.

4.2.4 Pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan uji regresi berganda dengan menggunakan program SPSS 16.0 terhadap 84 sampel menunjukkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah yang dipisahkan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan arah pengaruhnya positif. Ini berarti bahwa semakin tinggi Lain-lain PAD yang Sah maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil penelitian ini setiap kenaikan 1% dari lain-lain PAD, maka akan

mengakibatkan kenaikan sebesar 1.001 dari pendapatan asli daerah. Pengaruh positif yang ditunjukkan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa lain-lain PAD berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk kontribusi lain-lain PAD terhadap pendapatan asli daerah pada kota dan kabupaten di wilayah Indonesia pada tahun 2010 mencapai 39%, tahun 2011 mencapai 39%, dan tahun 2012 mencapai 40%. Adanya kenaikan persentase untuk lain-lain PAD membuktikan bahwa lain-lain PAD berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Faktor yang menyebabkan adanya kenaikan dari lain-lain PAD itu sendiri dikarenakan masing-masing daerah telah meningkatkan pendapatan daerahnya di luar pajak, retribusi dan penyertaan modal pada perusahaan BUMD, dengan pendapatan dari jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas penjualan kekayaan daerah, adanya komisi dari penjualan barang oleh Pemda, adanya fasilitas sosial, dan masih banyak yang telah ditetapkan kebijakan oleh Pemda masing-masing daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan Pengaruh Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Indonesia. Sehingga hipotesis bisa diterima.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Indonesia. Sehingga hipotesis bias diterima.
3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa laba BUMD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Indonesia. Sehingga hipotesis bisa diterima.
4. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa lain-lain PAD berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Indonesia. Sehingga hipotesis diterima.
5. Hasil penelitian ini bahwa kontribusi Pajak daerah lebih besar untuk Pendapatan Asli Daerah.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil kesimpulan yang sudah dijabarkan sebelumnya akan menjadi dasar bagi peneliti menentukan implikasi dari penelitian ini. Implikasi tersebut antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah seluruh kota dan kabupaten di wilayah Indonesia pada umumnya lebih meningkatkan pendapatan asli daerahnya, terutama dari aspek pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain PAD.
2. Dengan penelitian ini, untuk pengambil keputusan kebijakan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk semua kabupaten dan kota di wilayah Indonesia dalam upaya memajukan daerahnya khususnya di penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan tidak terlalu bergantung dengan dana dari pusat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam mengembangkan dan melakukan penelitian yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam penelitiannya, pada penelitian ini tidak digunakannya aspek lain sebagai pendukung untuk melihat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

5.4 Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah aspek-aspek lain selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Sumber PAD lainnya yang sah yaitu : PBB (Pajak Bumi dan bangunan), luas wilayah, jumlah penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani, Evi (2012). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2011.
- Bastian, Indra (2001). *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Brotodihardjo, Santoso, (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. ERESKO, Bandung.
- Elfianti, Lis (2011). Potensi dan Strategi pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- Erlina, Sri Mulyani (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cet. 1.-. USU Press, Medan.
- Ghozali, Imam (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul (2002). *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Manajemen dan Akuntansi, Edisi Pertama*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: BPEE.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

- Marpen, Alfredo (2013). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatra Bagian Selatan.
- Marihot P. Siahaan (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Grafindo.
- Mamesah, D.J, (1995). *Sistem administrasi Keuangan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Mayasari, Dian (2009). Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis terhadap kabupaten dan kota di Jawa Timur). *Skripsi* Pada FE UMM.
- Nursalam (2003). *Konsep dan penerapan metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta : Salemba Empat.Republika Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan Undang-undang APBD 2011.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 13 tahun 2006, tentang Pembiayaan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, Retribusi Daerah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- , Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

-----, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

-----, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Tentang Pajak

-----, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Rahman, Herlna (2005). Peranan investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Negara-negara Asia Timur.

Sasana, Hadi (2006). Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah.

Soamole, Mulyadi (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Sugiyono (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : CV. ALFABETA

Syafitri, Lili (2012). Analisis Peranan dan kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapata Asli Daerah Kota Jambi.

www.djpk.depkeu.go.id

www.BisnisAceh.com

Artikel Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

LAMPIRAN

Lampiran 1

**Tabel Distribusi Data Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada
Sampel Kota Dan Kabupaten di Wilayah Indonesia**

No	NAMA KOTA KABUPATEN	TAHUN	PAD	PAJAK	RETRIBUSI	LABA_BUMD	LAIN_LAIN_PAD
1	KABUPATEN ACEH BARAT	2010	2.43E+10	4.87E+09	5.98E+09	2.99E+09	1.04E+10
		2011	2.10E+10	5.85E+09	5.36E+09	2.22E+09	7.61E+09
		2012	1.26E+10	3.99E+09	3.49E+09	2.52E+09	2.62E+09
2	KOTA SABANG	2010	1.71E+10	1.78E+09	2.09E+09	9.25E+08	1.23E+10
		2011	2.24E+10	2.38E+09	3.11E+09	7.76E+08	1.61E+10
		2012	1.13E+10	1.64E+09	2.00E+09	1.00E+09	6.68E+09
3	Kabupaten Pidie Jaya	2010	4.60E+09	2.13E+09	1.12E+09	1.72E+08	1.18E+09
		2011	2.29E+10	8.18E+09	6.12E+09	9.07E+08	7.75E+09
		2012	2.47E+10	6.12E+09	1.38E+10	5.00E+07	4.75E+09
4	Kabupaaten Toba Samosir	2010	1.20E+10	3.41E+09	4.15E+09	2.35E+09	2.08E+09

		2011	1.41E+10	4.15E+09	4.24E+09	2.96E+09	2.77E+09
		2012	8.95E+09	2.37E+09	1.69E+09	2.64E+09	2.25E+09
5	Kota Sibolga	2010	1.51E+10	2.66E+09	7.15E+09	2.88E+09	2.43E+09
		2011	2.17E+10	4.75E+09	8.16E+09	4.90E+09	3.86E+09
		2012	1.67E+10	3.13E+09	5.74E+09	5.20E+09	2.65E+09
6	Kota Tanjung Balai	2010	2.41E+10	5.03E+09	1.00E+10	2.84E+09	6.20E+09
		2011	2.71E+10	6.91E+09	9.77E+09	4.93E+09	5.48E+09
		2012	1.88E+10	3.76E+09	7.28E+09	4.79E+09	2.95E+09
7	Kabupaten Samosir	2010	1.18E+10	3.70E+09	3.60E+09	5.06E+08	4.01E+09
		2011	1.42E+10	5.02E+09	3.82E+09	3.36E+09	7.89E+09
		2012	1.09E+10	1.83E+09	4.09E+09	3.08E+09	6.32E+09
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	2010	1.74E+10	3.66E+09	6.69E+09	2.05E+09	5.04E+09
		2011	2.40E+10	5.14E+09	7.65E+09	3.36E+09	7.89E+09
		2012	1.94E+10	7.73E+09	2.26E+09	3.08E+09	6.32E+09
9	Kabupaten padang pariaman	2010	2.47E+10	7.53E+09	3.83E+09	2.55E+09	1.08E+10
		2011	2.71E+10	1.00E+10	3.60E+09	4.31E+09	9.13E+09
		2012	2.18E+10	9.49E+09	2.09E+09	4.04E+09	6.16E+09

10	Kota Bukit Tinggi	2010	3.38E+10	1.17E+10	1.26E+10	1.83E+09	7.68E+09
		2011	4.22E+10	1.75E+10	1.40E+10	3.04E+09	7.70E+09
		2012	3.30E+10	1.40E+10	1.09E+10	2.61E+09	5.53E+09
11	Kota Pariaman	2010	1.49E+10	2.68E+09	1.79E+09	2.40E+09	8.01E+09
		2011	1.70E+10	2.49E+09	1.75E+09	4.00E+09	8.81E+09
		2012	1.37E+10	2.09E+09	1.14E+09	4.06E+09	6.41E+09
12	Kota Jambi	2010	7.08E+10	3.55E+10	2.04E+10	2.86E+09	1.21E+10
		2011	9.90E+10	5.96E+10	2.22E+10	5.47E+09	1.17E+10
		2012	8.27E+10	5.30E+10	1.59E+10	2.95E+09	1.09E+10
13	Kabupaten Tebo	2010	1.60E+10	3.23E+09	4.33E+09	4.07E+09	4.33E+09
		2011	1.95E+10	5.31E+09	3.97E+09	5.25E+09	5.00E+09
		2012	2.03E+10	4.44E+09	2.59E+09	5.59E+09	7.71E+09
14	Kab Banyuasin	2010	2.25E+10	6.56E+09	5.35E+09	9.72E+08	9.61E+09
		2011	2.98E+10	1.04E+10	6.13E+09	1.60E+09	1.16E+10
		2012	3.57E+10	1.92E+10	7.47E+09	6.53E+08	8.37E+09
15	kota lubuk linggau	2010	1.64E+10	6.11E+09	4.56E+09	1.50E+09	4.21E+09
		2011	3.43E+10	1.21E+10	4.58E+09	2.07E+09	1.55E+10

		2012	2.68E+10	9.29E+09	3.10E+09	6.19E+08	1.38E+10
16	kabupaten lampung barat	2010	1.62E+10	3.29E+09	3.28E+09	1.09E+09	8.54E+09
		2011	2.16E+10	3.82E+09	8.57E+09	1.89E+09	7.28E+09
		2012	1.23E+10	1.33E+11	4.32E+10	1.86E+09	1.30E+10
17	kabupaten tulang bawang	2010	2.25E+10	2.16E+09	7.17E+08	1.19E+09	1.85E+10
		2011	2.00E+10	3.07E+09	1.73E+09	2.13E+09	1.31E+10
		2012	1.06E+10	3.51E+09	1.30E+09	2.75E+09	3.04E+09
18	kabupaten tanggamus	2010	1.17E+10	4.71E+09	1.93E+09	1.60E+09	3.42E+09
		2011	1.61E+10	6.23E+09	1.60E+09	2.45E+09	5.87E+09
		2012	1.31E+10	4.54E+09	1.11E+09	2.67E+09	4.77E+09
19	kabupaten way kanan	2010	8.75E+09	1.63E+09	3.34E+09	6.41E+08	3.14E+09
		2011	9.47E+09	3.41E+09	3.10E+09	9.20E+08	2.05E+09
		2012	7.15E+09	2.06E+09	1.67E+09	1.10E+09	2.32E+09
20	kabupaten bogor	2010	3.99E+11	1.97E+11	1.20E+11	2.29E+10	5.98E+10
		2011	6.97E+11	4.57E+11	1.09E+11	2.34E+10	1.08E+11
		2012	7.62E+11	5.37E+11	9.20E+10	1.33E+10	1.19E+11

21	kabupaten bekasi	2010	1.09E+11	1.08E+10	1.45E+10	2.49E+09	8.11E+10
		2011	1.22E+11	2.45E+10	1.53E+10	1.62E+09	8.11E+10
		2012	1.21E+11	2.67E+10	1.08E+10	1.61E+09	8.23E+10
22	kabupaten karawang	2010	2.10E+11	7.78E+10	2.00E+10	3.62E+09	1.09E+11
		2011	3.79E+11	2.41E+11	3.44E+10	4.32E+09	9.90E+10
		2012	3.92E+11	2.78E+11	2.43E+10	4.19E+09	8.56E+10
23	kabupaten majalengka	2010	7.64E+10	5.17E+09	1.24E+10	3.74E+09	5.50E+10
		2011	8.66E+10	1.30E+10	1.20E+10	3.16E+09	5.85E+10
		2012	7.03E+10	1.00E+10	9.63E+09	3.72E+09	4.70E+10
24	kabupaten Subang	2010	7.55E+10	2.31E+10	9.68E+09	5.94E+09	3.68E+10
		2011	9.42E+10	3.60E+10	9.43E+09	9.30E+09	3.95E+10
		2012	8.78E+10	2.76E+10	1.47E+10	1.07E+10	3.47E+10
25	kabupaten sukabumi	2010	6.27E+10	1.55E+10	3.56E+10	6.27E+09	4.11E+10
		2011	1.52E+11	6.85E+10	3.33E+10	5.20E+09	4.49E+10
		2012	1.42E+11	5.74E+10	1.59E+10	5.98E+09	6.27E+10
26	kabupaten sumedang	2010	1.09E+11	3.41E+10	6.66E+09	3.58E+09	6.43E+10
		2011	1.40E+11	5.14E+10	1.05E+10	3.11E+09	7.48E+10

		2012	1.18E+11	4.40E+10	9.08E+09	2.81E+09	6.18E+10
27	kabupaten tasikmalaya	2010	4.83E+10	1.21E+10	1.43E+10	1.38E+10	8.19E+09
		2011	5.12E+10	1.79E+10	1.53E+10	8.04E+09	9.94E+09
		2012	4.99E+10	1.49E+10	1.30E+10	1.25E+10	9.52E+09
28	kota bekasi	2010	2.96E+11	1.51E+11	2.92E+10	7.29E+09	1.09E+11
		2011	5.68E+11	3.76E+11	4.01E+10	7.42E+09	1.45E+11
		2012	4.62E+11	3.37E+11	2.85E+10	4.63E+09	9.20E+10
29	kota sukabumi	2010	9.15E+10	7.57E+09	6.73E+09	3.31E+09	7.39E+10
		2011	1.15E+11	1.52E+10	6.68E+09	3.08E+09	9.05E+10
		2012	1.15E+11	1.22E+10	6.37E+09	3.18E+09	9.34E+10
30	kota banjar	2010	3.74E+10	2.09E+09	2.68E+10	2.62E+09	5.83E+09
		2011	4.60E+10	3.37E+09	3.35E+10	2.45E+09	6.64E+09
		2012	3.02E+10	3.26E+09	2.98E+09	2.50E+09	2.15E+10
31	kabupaten batang	2010	4.54E+10	1.01E+10	2.47E+10	2.68E+09	8.00E+09
		2011	6.02E+10	1.44E+10	2.96E+10	3.27E+09	1.29E+10
		2012	5.27E+10	1.17E+10	9.39E+09	2.48E+09	2.91E+10
32	kabupaten Blora	2010	4.71E+10	9.43E+09	2.39E+10	3.22E+09	1.05E+10
		2011	6.70E+10	1.12E+10	8.75E+09	5.88E+09	4.12E+10

		2012	5.45E+10	7.72E+09	6.89E+09	4.95E+09	3.49E+10
33	kabupaten boyolali	2010	8.65E+10	1.41E+10	2.54E+10	4.51E+09	4.25E+10
		2011	9.67E+10	1.93E+10	2.01E+10	4.51E+09	5.28E+10
		2012	9.30E+10	1.68E+10	2.49E+10	5.41E+09	4.58E+10
34	kabupaten demak	2010	5.68E+10	1.35E+10	3.03E+10	4.03E+09	8.94E+09
		2011	7.46E+10	2.45E+10	1.11E+10	4.80E+09	3.42E+10
		2012	6.77E+10	1.91E+10	8.84E+09	6.29E+09	3.34E+10
35	kabupaten kebumen	2010	5.87E+10	1.28E+10	3.53E+10	1.96E+09	8.69E+09
		2011	7.35E+10	1.73E+10	1.64E+10	2.75E+09	3.70E+10
		2012	5.92E+10	1.40E+10	1.55E+10	3.85E+09	2.58E+10
36	kabupaten kendal	2010	8.62E+10	2.37E+10	1.60E+10	4.48E+09	7.36E+11
		2011	9.33E+10	2.59E+10	1.47E+10	3.29E+09	4.94E+10
		2012	8.50E+10	2.51E+10	1.20E+10	4.34E+09	4.35E+10
37	kabupaten klaten	2010	5.49E+10	1.95E+10	1.48E+10	4.00E+09	1.66E+10
		2011	7.23E+10	2.83E+10	1.55E+10	3.80E+09	2.47E+10
		2012	6.06E+10	2.20E+10	1.38E+10	4.02E+09	2.07E+10
38	kabupaten kudus	2010	9.40E+10	2.17E+10	5.56E+10	3.88E+09	1.28E+10

		2011	1.08E+11	3.67E+10	5.46E+10	4.62E+09	1.26E+10
		2012	8.36E+10	2.78E+10	9.76E+09	3.58E+09	4.25E+10
39	kabupaten magelang	2010	7.61E+10	2.24E+10	3.68E+10	6.72E+09	1.02E+10
		2011	9.05E+10	2.93E+10	3.71E+10	7.90E+09	1.61E+10
		2012	8.55E+10	3.19E+10	1.67E+10	3.82E+09	3.31E+10
40	kabupaten pati	2010	1.13E+11	1.77E+10	1.72E+10	4.23E+09	7.34E+10
		2011	1.34E+11	3.02E+10	2.16E+10	4.05E+09	7.86E+10
		2012	1.05E+11	1.80E+10	2.04E+10	5.69E+09	6.05E+10
41	kabupaten pekalongan	2010	6.76E+10	1.07E+10	4.81E+10	2.20E+09	6.57E+09
		2011	8.14E+10	1.51E+10	5.88E+10	1.97E+09	5.53E+09
		2012	7.20E+10	1.24E+10	1.47E+10	2.31E+09	4.27E+10
42	kabupaten purworejo	2010	6.96E+10	8.29E+09	1.16E+10	2.40E+09	4.74E+10
		2011	8.89E+10	1.20E+10	1.22E+10	2.85E+09	6.19E+10
		2012	7.27E+10	8.40E+09	1.07E+10	2.93E+09	5.07E+10
43	kabupaten tegal	2010	7.31E+10	1.45E+10	1.02E+10	4.32E+09	4.41E+10
		2011	9.01E+10	2.19E+10	1.20E+10	4.47E+09	5.18E+10
		2012	7.24E+10	8.40E+09	1.07E+10	2.93E+09	5.07E+10

44	kabupaten wonogiri	2010	6.50E+10	9.60E+09	2.79E+10	5.10E+09	2.24E+10
		2011	7.71E+10	1.09E+10	1.46E+10	5.23E+09	4.65E+10
		2012	7.24E+10	1.85E+10	1.08E+10	3.86E+09	3.93E+10
45	kabupaten wonosobo	2010	5.21E+10	6.74E+09	3.63E+10	3.77E+09	5.24E+09
		2011	7.71E+10	1.09E+10	1.46E+10	5.23E+09	4.65E+10
		2012	5.77E+10	6.50E+09	1.10E+10	1.79E+09	3.84E+10
46	kota pekalongan	2010	4.75E+10	1.23E+10	1.36E+10	1.44E+09	2.01E+10
		2011	6.33E+10	1.99E+10	1.49E+10	2.20E+09	2.63E+10
		2012	3.65E+10	1.66E+10	1.23E+10	8.08E+08	6.77E+09
47	kota salatiga	2010	5.15E+10	9.21E+09	7.28E+09	2.47E+09	3.26E+10
		2011	6.06E+10	1.59E+10	7.56E+09	2.96E+09	3.42E+10
		2012	5.26E+10	1.27E+10	7.23E+09	3.06E+09	2.96E+10
48	kota tegal	2010	1.01E+11	1.31E+10	9.58E+09	6.75E+08	7.80E+10
		2011	1.17E+11	2.09E+10	1.41E+10	1.93E+09	8.03E+10
		2012	8.58E+10	2.06E+10	1.42E+10	2.08E+09	4.89E+10
49	kabupaten kulon progo	2010	4.83E+10	4.31E+09	7.73E+09	4.74E+09	3.15E+10
		2011	5.38E+10	5.85E+09	8.45E+09	4.94E+09	3.45E+10
		2012	4.53E+10	2.06E+10	6.07E+09	5.80E+09	2.73E+10

50	kabupaten sleman	2010	1.63E+11	8.06E+10	5.91E+10	1.02E+10	1.32E+10
		2011	2.27E+11	1.43E+11	3.32E+10	1.10E+10	3.98E+10
		2012	2.05E+11	1.25E+11	2.39E+10	1.11E+10	4.51E+10
51	kabupaten banyuwangi	2010	9.07E+10	2.61E+10	2.08E+10	8.79E+09	3.49E+10
		2011	1.13E+11	3.24E+10	2.16E+10	9.98E+09	4.93E+10
		2012	9.58E+10	2.76E+10	1.68E+10	1.16E+10	3.98E+10
52	kabupaten blitar	2010	6.39E+10	1.36E+10	1.32E+10	8.78E+08	3.62E+10
		2011	7.62E+10	1.75E+10	1.34E+10	1.25E+09	4.41E+10
		2012	7.24E+10	1.36E+10	1.21E+10	1.40E+09	4.53E+10
53	kabupaten bojonegoro	2010	7.99E+10	1.50E+10	1.31E+10	8.03E+08	5.10E+10
		2011	1.65E+11	5.32E+10	3.14E+10	1.55E+09	7.85E+10
		2012	1.13E+11	1.92E+10	2.96E+10	1.02E+10	5.42E+10
54	kabupaten jember	2010	1.51E+11	3.09E+10	1.19E+10	1.19E+10	8.85E+10
		2011	1.82E+11	4.07E+10	1.53E+10	1.53E+10	1.06E+11
		2012	1.81E+11	3.99E+10	1.31E+10	1.31E+10	1.06E+11
55	kabupaten madiun	2010	4.50E+10	8.01E+09	7.90E+09	1.95E+09	2.72E+10
		2011	5.80E+10	1.21E+10	1.06E+10	2.18E+09	3.31E+10

		2012	4.76E+10	9.24E+09	8.83E+09	2.38E+09	2.71E+10
56	kabupaten magetan	2010	5.20E+10	7.69E+09	9.31E+09	2.49E+09	3.25E+10
		2011	6.18E+10	9.89E+09	1.07E+10	3.12E+09	3.81E+10
		2012	4.85E+10	8.32E+09	1.27E+10	1.04E+09	2.64E+10
57	kabupaten malang	2010	1.30E+11	3.94E+10	2.99E+10	6.30E+09	5.49E+10
		2011	1.72E+11	6.47E+10	3.71E+10	9.08E+09	6.14E+10
		2012	1.45E+11	5.04E+10	2.97E+10	1.05E+10	5.47E+10
58	kabupaten pamekasan	2010	4.93E+10	7.22E+09	3.21E+10	1.15E+09	8.89E+09
		2011	7.07E+10	9.56E+09	9.28E+09	2.23E+09	4.96E+10
		2012	6.07E+10	8.14E+09	9.26E+09	2.19E+09	4.11E+10
59	kabupaten pasuruan	2010	1.00E+11	5.59E+10	2.69E+10	1.59E+09	1.59E+10
		2011	1.55E+11	9.14E+10	4.76E+10	2.11E+09	1.42E+10
		2012	1.26E+11	7.80E+10	3.22E+10	2.38E+09	1.33E+10
60	kabupaten ponorogo	2010	4.87E+10	1.11E+10	3.24E+10	1.01E+09	4.13E+09
		2011	6.59E+10	1.61E+10	4.18E+10	1.34E+09	6.67E+09
		2012	6.44E+10	1.39E+10	1.17E+10	1.28E+09	3.75E+10
61	kabupaten sampang	2010	3.64E+10	5.06E+09	1.82E+10	3.15E+09	9.94E+09

		2011	4.70E+10	6.63E+09	2.79E+10	4.71E+09	7.71E+09
		2012	4.15E+10	4.97E+09	2.50E+10	6.69E+09	4.79E+09
62	kabupaten trenggalek	2010	5.36E+10	6.93E+09	1.83E+10	1.84E+09	2.65E+10
		2011	6.31E+10	8.86E+09	1.90E+10	2.88E+09	3.23E+10
		2012	4.13E+10	6.34E+09	1.51E+10	2.10E+09	1.78E+10
63	kota blitar	2010	4.77E+10	4.86E+09	6.65E+09	4.67E+08	3.57E+10
		2011	5.26E+10	1.05E+10	6.69E+09	8.02E+08	3.45E+10
		2012	4.39E+10	7.13E+09	4.47E+09	9.50E+08	3.13E+10
64	kota malang	2010	1.63E+11	1.07E+11	2.64E+10	1.44E+10	1.56E+10
		2011	1.86E+11	1.25E+11	3.12E+10	1.33E+10	1.60E+10
		2012	1.13E+11	6.02E+10	2.73E+10	1.33E+10	1.27E+10
65	kota mojokerto	2010	3.16E+10	7.27E+09	1.96E+10	1.30E+09	3.41E+09
		2011	4.22E+10	1.26E+10	2.33E+10	2.58E+09	3.68E+09
		2012	3.70E+10	1.13E+10	1.86E+10	2.43E+09	4.75E+09
66	kota pasuruan	2010	3.41E+10	6.84E+09	1.57E+10	3.97E+09	7.61E+09
		2011	4.52E+10	1.11E+10	1.47E+10	5.53E+09	1.39E+10
		2012	3.06E+10	1.00E+10	1.18E+10	4.42E+09	4.38E+09
67	kabupaten bengkayang	2010	1.17E+10	8.69E+08	2.46E+09	1.33E+09	7.07E+09

		2011	1.55E+10	1.85E+09	5.58E+09	2.12E+09	5.92E+09
		2012	5.92E+09	1.26E+10	2.35E+09	4.33E+09	2.08E+09
68	kabupaten landak	2010	1.54E+10	3.32E+09	2.17E+09	2.44E+09	7.45E+09
		2011	2.06E+10	1.24E+10	1.95E+09	2.93E+09	3.34E+09
		2012	1.26E+10	2.35E+09	4.33E+09	2.08E+09	3.80E+09
69	kabupaten kapuas hulu	2010	2.06E+10	8.38E+08	6.28E+09	3.61E+09	9.88E+09
		2011	2.47E+10	2.19E+09	7.65E+09	4.26E+09	1.06E+10
		2012	2.49E+10	5.16E+09	8.04E+09	5.84E+09	5.85E+09
70	kabupaten ketapang	2010	3.08E+10	5.31E+09	3.41E+09	3.40E+09	1.86E+10
		2011	4.34E+10	8.86E+09	4.23E+09	4.83E+09	2.55E+10
		2012	4.62E+10	2.32E+10	2.93E+09	5.45E+09	1.46E+10
71	kabupaten pontianak	2010	1.47E+10	3.77E+09	2.77E+09	2.15E+09	5.98E+09
		2011	2.22E+10	6.69E+09	3.74E+09	2.37E+09	9.42E+09
		2012	1.88E+10	6.52E+09	3.85E+09	2.32E+09	9.42E+09
72	kabupaten sanggau	2010	2.05E+10	4.70E+09	7.51E+09	2.79E+09	5.53E+09
		2011	3.54E+10	1.27E+10	1.09E+10	3.80E+09	7.92E+09
		2012	7.92E+09	3.33E+10	1.32E+10	8.71E+09	3.75E+09

73	kabupaten sintang	2010	3.03E+10	2.34E+09	1.24E+10	3.09E+09	1.25E+10
		2011	5.37E+10	1.07E+10	1.74E+10	4.19E+09	2.14E+10
		2012	3.59E+10	5.37E+09	1.29E+10	3.36E+09	1.43E+10
74	kabupaten barito utara	2010	2.09E+10	1.30E+09	9.00E+09	2.20E+09	8.37E+09
		2011	2.00E+10	2.58E+09	8.35E+09	2.82E+09	6.20E+09
		2012	6.20E+09	9.00E+09	1.88E+10	2.02E+09	1.70E+09
75	kabupaten kapuas	2010	1.84E+10	2.57E+09	6.93E+09	1.56E+09	7.35E+09
		2011	2.55E+10	4.30E+09	8.59E+09	2.20E+09	1.04E+10
		2012	1.88E+10	4.19E+09	8.41E+09	3.37E+09	4.95E+09
76	kabupaten kotawaringin barat	2010	4.28E+10	5.01E+09	2.82E+10	3.30E+09	6.26E+09
		2011	4.82E+10	9.43E+09	2.74E+10	4.22E+09	7.14E+09
		2012	4.70E+10	1.10E+10	2.40E+10	4.72E+09	7.22E+09
77	kota palangkaraya	2010	2.58E+10	1.39E+10	7.96E+09	4.31E+08	3.56E+09
		2011	3.47E+10	2.32E+10	8.65E+09	5.32E+08	2.36E+09
		2012	3.40E+10	2.29E+10	6.68E+09	7.75E+08	3.67E+09
78	kabupaten seruyan	2010	1.84E+10	1.25E+09	2.56E+09	1.46E+09	1.31E+10

		2011	2.81E+10	1.37E+10	3.07E+09	1.77E+09	9.61E+09
		2012	1.11E+10	8.47E+08	2.25E+09	2.51E+09	5.50E+09
79	kabupaten sukamara	2010	1.17E+10	6.13E+08	1.59E+09	1.94E+09	7.55E+09
		2011	1.17E+10	1.55E+09	2.50E+09	2.57E+09	7.55E+09
		2012	1.15E+10	1.02E+09	2.67E+09	3.78E+09	4.07E+09
80	kabupaten banjar	2010	4.93E+10	8.04E+09	1.72E+10	2.14E+10	2.68E+09
		2011	9.68E+10	1.63E+10	8.52E+09	4.73E+10	2.46E+10
		2012	1.16E+11	1.53E+10	3.89E+10	5.13E+10	1.08E+10
81	kabupaten barito kuala	2010	1.52E+10	3.29E+09	5.84E+09	1.29E+09	4.75E+09
		2011	1.78E+10	4.19E+09	3.36E+09	1.65E+09	8.62E+09
		2012	1.51E+10	3.85E+09	2.56E+09	1.25E+09	7.39E+09
82	kabupaten kota baru	2010	4.37E+10	1.45E+10	1.17E+10	3.34E+09	1.41E+10
		2011	4.85E+10	1.56E+10	1.23E+10	4.48E+09	1.62E+10
		2012	3.87E+10	1.09E+10	7.87E+09	4.18E+09	1.57E+10
83	kota banjarmasin	2010	8.05E+10	4.30E+10	1.82E+10	9.25E+09	1.01E+10
		2011	1.19E+11	7.31E+10	2.11E+10	1.04E+10	1.39E+10
		2012	1.05E+11	6.76E+10	1.83E+10	6.97E+09	1.18E+10

84	kabupaten bulungan	2010	9.43E+10	2.90E+09	2.54E+10	1.74E+10	4.85E+10
		2011	8.46E+10	7.83E+09	6.20E+09	2.33E+10	4.72E+10
		2012	5.71E+10	2.24E+09	2.17E+09	1.68E+10	3.59E+10

Lampiran 2

Tabel Persentase Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, dan Lain-Lain PAD Terhadap Peningkatan PAD Pada Kota dan Kabupaten di Wilayah Indonesia

No	NAMA KOTA / KABUPATEN	TAHUN	PAJAK	RETRIBUSI	LABA BUMD	LAIN- LAIN PAD
1	KABUPATEN ACEH BARAT	2010	20%	25%	12%	43%
		2011	28%	25%	11%	36%
		2012	32%	28%	20%	21%
	Rata-rata 3 tahun		27%	26%	14%	33%

2	KOTA SABANG	2010	10%	12%	5%	72%
		2011	11%	14%	3%	72%
		2012	14%	18%	9%	59%
	Rata-rata 3 tahun		12%	15%	6%	68%
3	Kabupaten Pidie Jaya	2010	46%	24%	4%	26%
		2011	36%	27%	4%	34%
		2012	25%	56%	0%	19%
	Rata-rata 3 tahun		36%	36%	3%	26%
4	Kabupaten Toba Samosir	2010	28%	35%	20%	17%
		2011	29%	30%	21%	20%
		2012	26%	19%	30%	25%
	Rata-rata 3 tahun		28%	28%	23%	21%
5	Kota Sibolga	2010	18%	47%	19%	16%
		2011	22%	38%	23%	18%
		2012	19%	34%	31%	16%
	Rata-rata 3 tahun		19%	40%	24%	17%
6	Kota Tanjung Balai	2010	21%	42%	12%	26%
		2011	26%	36%	18%	20%
		2012	20%	39%	25%	16%

	Rata-rata 3 tahun		22%	39%	18%	21%
7	Kabupaten Samosir	2010	31%	30%	4%	34%
		2011	35%	27%	24%	56%
		2012	17%	37%	28%	58%
	Rata-rata 3 tahun		28%	32%	19%	49%
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	2010	21%	38%	12%	29%
		2011	21%	32%	14%	33%
		2012	40%	12%	16%	33%
	Rata-rata 3 tahun		27%	27%	14%	31%
9	Kabupaten padang pariaman	2010	30%	15%	10%	44%
		2011	37%	13%	16%	34%
		2012	44%	10%	19%	28%
	Rata-rata 3 tahun		37%	13%	15%	35%
10	Kota Bukit Tinggi	2010	35%	37%	5%	23%
		2011	41%	33%	7%	18%
		2012	42%	33%	8%	17%
	Rata-rata 3 tahun		39%	34%	7%	19%
11	Kota Pariaman	2010	18%	12%	16%	54%
		2011	15%	10%	23%	52%

		2012	15%	8%	30%	47%
	Rata-rata 3 tahun		16%	10%	23%	51%
12	Kota Jambi	2010	50%	29%	4%	17%
		2011	60%	22%	6%	12%
		2012	64%	19%	4%	13%
	Rata-rata 3 tahun		58%	23%	4%	14%
13	Kabupaten Tebo	2010	20%	27%	26%	27%
		2011	27%	20%	27%	26%
		2012	22%	13%	27%	38%
	Rata-rata 3 tahun		23%	20%	27%	30%
14	Kab Banyuasin	2010	29%	24%	4%	43%
		2011	35%	21%	5%	39%
		2012	54%	21%	2%	23%
	Rata-rata 3 tahun		39%	22%	4%	35%
15	kota lubuk linggau	2010	37%	28%	9%	26%
		2011	35%	13%	6%	45%
		2012	35%	12%	2%	51%
	Rata-rata 3 tahun		36%	18%	6%	41%
16	kabupaten lampung	2010	20%	20%	7%	53%

	barat	2011	18%	40%	9%	34%
		2012	24%	2%	18%	56%
	Rata-rata 3 tahun		21%	21%	11%	47%
17	kabupaten tulang bawang	2010	10%	3%	5%	82%
		2011	15%	9%	11%	65%
		2012	33%	12%	26%	29%
	Rata-rata 3 tahun		19%	8%	14%	59%
18	kabupaten tanggamus	2010	40%	17%	14%	29%
		2011	39%	10%	15%	36%
		2012	35%	9%	20%	36%
	Rata-rata 3 tahun		38%	12%	16%	34%
19	kabupaten way kanan	2010	19%	38%	7%	36%
		2011	36%	33%	10%	22%
		2012	29%	23%	15%	32%
	Rata-rata 3 tahun		28%	31%	11%	30%
20	kabupaten bogor	2010	49%	30%	6%	15%
		2011	66%	16%	3%	16%
		2012	70%	12%	2%	16%
	Rata-rata 3 tahun		62%	19%	4%	15%

21	kabupaten bekasi	2010	10%	13%	2%	74%
		2011	20%	12%	1%	66%
		2012	22%	9%	1%	68%
	Rata-rata 3 tahun		17%	12%	2%	69%
22	kabupaten karawang	2010	37%	9%	2%	52%
		2011	64%	9%	1%	26%
		2012	71%	6%	1%	22%
	Rata-rata 3 tahun		57%	8%	1%	33%
23	kabupaten majalengka	2010	7%	16%	5%	72%
		2011	15%	14%	4%	68%
		2012	14%	14%	5%	67%
	Rata-rata 3 tahun		12%	15%	5%	69%
24	kabupaten Subang	2010	31%	13%	8%	49%
		2011	38%	10%	10%	42%
		2012	31%	17%	12%	40%
	Rata-rata 3 tahun		33%	13%	10%	43%
25	kabupaten sukabumi	2010	25%	57%	10%	66%
		2011	45%	22%	3%	30%
		2012	40%	11%	4%	44%

	Rata-rata 3 tahun		37%	30%	6%	46%
26	kabupaten sumedang	2010	31%	6%	3%	59%
		2011	37%	8%	2%	53%
		2012	37%	8%	2%	52%
	Rata-rata 3 tahun		35%	7%	3%	55%
27	kabupaten tasikmalaya	2010	25%	30%	28%	17%
		2011	35%	30%	16%	19%
		2012	30%	26%	25%	19%
	Rata-rata 3 tahun		30%	29%	23%	18%
28	kota bekasi	2010	51%	10%	2%	37%
		2011	66%	7%	1%	25%
		2012	73%	6%	1%	20%
	Rata-rata 3 tahun		63%	8%	2%	27%
29	kota sukabumi	2010	8%	7%	4%	81%
		2011	13%	6%	3%	78%
		2012	40%	11%	4%	44%
	Rata-rata 3 tahun		21%	8%	3%	68%
30	kota banjar	2010	4%	35%	43%	5%
		2011	7%	73%	5%	14%

		2012	11%	10%	8%	71%
	Rata-rata 3 tahun		7%	39%	19%	30%
31	kabupaten batang	2010	22%	54%	6%	18%
		2011	24%	49%	5%	21%
		2012	22%	18%	5%	55%
	Rata-rata 3 tahun		23%	40%	5%	31%
32	kabupaten Blora	2010	20%	51%	7%	22%
		2011	17%	13%	9%	61%
		2012	14%	13%	9%	64%
	Rata-rata 3 tahun		17%	26%	8%	49%
33	kabupaten boyolali	2010	16%	29%	5%	49%
		2011	20%	21%	5%	55%
		2012	18%	27%	6%	49%
	Rata-rata 3 tahun		18%	26%	5%	51%
34	kabupaten demak	2010	24%	53%	7%	16%
		2011	33%	15%	6%	46%
		2012	28%	13%	9%	49%
	Rata-rata 3 tahun		28%	27%	8%	37%
35	kabupaten kebumen	2010	22%	60%	3%	15%

		2011	24%	22%	4%	50%
		2012	24%	26%	7%	44%
	Rata-rata 3 tahun		23%	36%	5%	36%
36	kabupaten kendal	2010	27%	19%	5%	49%
		2011	28%	16%	4%	53%
		2012	30%	14%	5%	51%
	Rata-rata 3 tahun		28%	16%	5%	51%
37	kabupaten klaten	2010	36%	27%	7%	30%
		2011	39%	21%	5%	34%
		2012	36%	23%	7%	34%
	Rata-rata 3 tahun		37%	24%	6%	33%
38	kabupaten kodus	2010	23%	59%	4%	14%
		2011	34%	50%	4%	12%
		2012	33%	12%	4%	51%
	Rata-rata 3 tahun		30%	40%	4%	25%
39	kabupaten magelang	2010	29%	48%	9%	13%
		2011	32%	41%	9%	18%
		2012	37%	19%	4%	39%
	Rata-rata 3 tahun		33%	36%	7%	23%

40	kabupaten pati	2010	16%	15%	4%	65%
		2011	22%	16%	3%	58%
		2012	17%	20%	5%	58%
	Rata-rata 3 tahun		18%	17%	4%	61%
41	kabupaten pekalongan	2010	16%	71%	3%	10%
		2011	19%	72%	2%	7%
		2012	17%	20%	3%	59%
	Rata-rata 3 tahun		17%	55%	3%	25%
42	kabupaten purworejo	2010	12%	17%	3%	68%
		2011	14%	14%	3%	70%
		2012	12%	15%	4%	70%
	Rata-rata 3 tahun		12%	15%	4%	69%
43	kabupaten tegal	2010	20%	14%	6%	60%
		2011	24%	13%	5%	57%
		2012	12%	15%	4%	70%
	Rata-rata 3 tahun		19%	14%	5%	63%
44	kabupaten wonogiri	2010	15%	43%	8%	34%
		2011	14%	19%	7%	60%
		2012	26%	15%	5%	54%

	Rata-rata 3 tahun		18%	26%	7%	50%
45	kabupaten wonosobo	2010	13%	70%	7%	10%
		2011	14%	19%	7%	60%
		2012	11%	19%	3%	67%
	Rata-rata 3 tahun		13%	36%	6%	46%
46	kota pekalongan	2010	26%	29%	3%	42%
		2011	31%	24%	3%	42%
		2012	46%	34%	2%	19%
	Rata-rata 3 tahun		34%	29%	3%	34%
47	kota salatiga	2010	18%	14%	5%	63%
		2011	26%	12%	5%	56%
		2012	24%	14%	6%	56%
	Rata-rata 3 tahun		23%	13%	5%	59%
48	kota tegal	2010	13%	9%	1%	77%
		2011	18%	12%	2%	68%
		2012	24%	17%	2%	57%
	Rata-rata 3 tahun		18%	13%	2%	68%
49	kabupaten kulon progo	2010	9%	16%	10%	65%
		2011	11%	16%	9%	64%

		2012	45%	13%	13%	60%
	Rata-rata 3 tahun		22%	15%	11%	63%
50	kabupaten sleman	2010	49%	36%	6%	8%
		2011	63%	15%	5%	18%
		2012	61%	12%	5%	22%
	Rata-rata 3 tahun		58%	21%	6%	16%
51	kabupaten banyuwangi	2010	29%	23%	10%	39%
		2011	29%	19%	9%	43%
		2012	29%	18%	12%	42%
	Rata-rata 3 tahun		29%	20%	10%	41%
52	kabupaten blitar	2010	21%	21%	1%	57%
		2011	23%	18%	2%	58%
		2012	19%	17%	2%	63%
	Rata-rata 3 tahun		21%	18%	2%	59%
53	kabupaten bojonegoro	2010	19%	16%	1%	64%
		2011	32%	19%	1%	48%
		2012	17%	26%	9%	48%
	Rata-rata 3 tahun		23%	21%	4%	53%
54	kabupaten jember	2010	20%	8%	8%	59%

		2011	22%	8%	8%	58%
		2012	22%	7%	7%	58%
	Rata-rata 3 tahun		22%	8%	8%	58%
55	kabupaten madiun	2010	18%	18%	4%	60%
		2011	21%	18%	4%	57%
		2012	19%	19%	5%	57%
	Rata-rata 3 tahun		19%	18%	4%	58%
56	kabupaten magetan	2010	15%	18%	5%	62%
		2011	16%	17%	5%	62%
		2012	17%	26%	2%	54%
	Rata-rata 3 tahun		16%	20%	4%	60%
57	kabupaten malang	2010	30%	23%	5%	42%
		2011	38%	22%	5%	36%
		2012	35%	20%	7%	38%
	Rata-rata 3 tahun		34%	22%	6%	38%
58	kabupaten pamekasan	2010	15%	65%	2%	18%
		2011	14%	13%	3%	70%
		2012	13%	15%	4%	68%
	Rata-rata 3 tahun		14%	31%	3%	52%

59	kabupaten pasuruan	2010	56%	27%	2%	16%
		2011	59%	31%	1%	9%
		2012	62%	26%	2%	11%
	Rata-rata 3 tahun		59%	28%	2%	12%
60	kabupaten ponorogo	2010	23%	67%	2%	8%
		2011	24%	63%	2%	10%
		2012	22%	18%	2%	58%
	Rata-rata 3 tahun		23%	49%	2%	26%
61	kabupaten sampang	2010	14%	50%	9%	27%
		2011	14%	59%	10%	16%
		2012	12%	60%	16%	12%
	Rata-rata 3 tahun		13%	57%	12%	18%
62	kabupaten trenggalek	2010	13%	34%	3%	49%
		2011	14%	30%	5%	51%
		2012	15%	36%	5%	43%
	Rata-rata 3 tahun		14%	34%	4%	48%
63	kota blitar	2010	10%	14%	1%	75%
		2011	20%	13%	2%	66%
		2012	16%	10%	2%	71%

	Rata-rata 3 tahun		15%	12%	2%	71%
64	kota malang	2010	65%	16%	9%	10%
		2011	67%	17%	7%	9%
		2012	53%	24%	12%	11%
	Rata-rata 3 tahun		62%	19%	9%	10%
65	kota mojokerto	2010	23%	62%	4%	11%
		2011	30%	55%	6%	9%
		2012	30%	50%	7%	13%
	Rata-rata 3 tahun		28%	56%	6%	11%
66	kota pasuruan	2010	20%	46%	12%	22%
		2011	25%	32%	12%	31%
		2012	33%	39%	14%	14%
	Rata-rata 3 tahun		26%	39%	13%	22%
67	kabupaten bengkayang	2010	7%	21%	11%	60%
		2011	12%	36%	14%	38%
		2012	19%	34%	17%	30%
	Rata-rata 3 tahun		13%	31%	14%	43%
68	kabupaten landak	2010	22%	14%	16%	48%
		2011	60%	9%	14%	16%

		2012	19%	34%	17%	30%
	Rata-rata 3 tahun		34%	19%	16%	32%
69	kabupaten kapuas hulu	2010	4%	30%	18%	48%
		2011	9%	31%	17%	43%
		2012	21%	32%	23%	23%
	Rata-rata 3 tahun		11%	31%	19%	38%
70	kabupaten ketapang	2010	17%	11%	11%	61%
		2011	20%	10%	11%	59%
		2012	50%	6%	12%	32%
	Rata-rata 3 tahun		29%	9%	11%	50%
71	kabupaten pontianak	2010	26%	19%	15%	41%
		2011	30%	17%	11%	42%
		2012	35%	21%	12%	50%
	Rata-rata 3 tahun		30%	19%	13%	44%
72	kabupaten senggau	2010	23%	37%	14%	27%
		2011	36%	31%	11%	22%
		2012	40%	26%	11%	23%
	Rata-rata 3 tahun		33%	31%	12%	24%
73	kabupaten sintang	2010	8%	41%	10%	41%

		2011	20%	32%	8%	40%
		2012	15%	36%	9%	40%
	Rata-rata 3 tahun		14%	36%	9%	40%
74	kabupaten barito utara	2010	6%	43%	11%	40%
		2011	13%	42%	14%	31%
		2012	11%	45%	18%	26%
	Rata-rata 3 tahun		10%	43%	14%	33%
75	kabupaten kapuas	2010	14%	38%	8%	40%
		2011	17%	34%	9%	41%
		2012	22%	45%	18%	26%
	Rata-rata 3 tahun		18%	39%	12%	36%
76	kabupaten kotawaringin barat	2010	12%	66%	8%	15%
		2011	20%	57%	9%	15%
		2012	23%	51%	10%	15%
	Rata-rata 3 tahun		18%	58%	9%	15%
77	kota palangkaraya	2010	54%	31%	2%	14%
		2011	67%	25%	2%	7%
		2012	67%	20%	2%	11%
	Rata-rata 3 tahun		63%	25%	2%	10%

78	kabupaten seruyan	2010	7%	14%	8%	71%
		2011	49%	11%	6%	34%
		2012	8%	20%	23%	50%
	Rata-rata 3 tahun		21%	15%	12%	52%
79	kabupaten sukamara	2010	5%	14%	17%	65%
		2011	13%	21%	22%	64%
		2012	9%	23%	33%	35%
	Rata-rata 3 tahun		9%	19%	24%	55%
80	kabupaten banjar	2010	16%	35%	43%	5%
		2011	17%	9%	49%	25%
		2012	13%	33%	44%	9%
	Rata-rata 3 tahun		15%	26%	45%	13%
81	kabupaten barito kuala	2010	22%	38%	9%	31%
		2011	24%	19%	9%	48%
		2012	26%	17%	8%	49%
	Rata-rata 3 tahun		24%	25%	9%	43%
82	kabupaten kota baru	2010	33%	27%	8%	32%
		2011	32%	25%	9%	33%
		2012	28%	20%	11%	41%

	Rata-rata 3 tahun		31%	24%	9%	35%
83	kota banjarmasin	2010	53%	23%	11%	13%
		2011	62%	18%	9%	12%
		2012	65%	18%	7%	11%
	Rata-rata 3 tahun		60%	19%	9%	12%
84	kabupaten bulungan	2010	3%	27%	18%	51%
		2011	9%	7%	28%	56%
		2012	4%	4%	29%	63%
	Rata-rata 3 tahun		5%	13%	25%	57%

Lampiran 3**Uji Deskriptif Statistik****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	252	5.E9	8.E11	7.27E10	9.208E10
PAJAK	252	6.E8	5.E11	2.73E10	6.191E10
RETRIBUSI	252	7.E8	1.E11	1.52E10	1.536E10
LABA_BUMD	252	5.E7	5.E10	4.62E9	5.600E9
LAIN_LAIN_PAD	252	1.E9	7.E11	2.95E10	5.231E10
Valid N (listwise)	252				

Lampiran 4**Uji Normalitas sebelum Outlier****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	PAD	PAJAK	RETRIBUSI	LABA_BUMD	LAIN_LAIN_PAD
N	252	252	252	252	252

Normal	Mean	7.27E10	2.73E10	1.52E10	4.62E9	2.95E10
Parameters ^a	Std. Deviation	9.208E10	6.191E10	1.536E10	5.600E9	5.231E10
Most Extreme Differences	Absolute	.230	.333	.178	.249	.294
	Positive	.210	.319	.178	.249	.190
	Negative	-.230	-.333	-.175	-.219	-.294
Kolmogorov-Smirnov Z		3.656	5.290	2.833	3.953	4.666
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
a. Test distribution is Normal.						

Lampiran 5

Uji Normalitas Sesudah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	PAJAK	RETRIBUSI	LABA_BUMD	LAIN_LAIN_PAD
N		239	239	239	239	239
Normal	Mean	7.33E10	2.72E10	1.53E10	4.53E9	2.63E10
Parameters ^a	Std. Deviation	9.327E10	6.311E10	1.552E10	5.646E9	2.639E10
Most Extreme	Absolute	.236	.337	.179	.257	.206
Differences	Positive	.217	.330	.179	.257	.206
	Negative	-.236	-.337	-.176	-.226	-.175
Kolmogorov	-Smirnov Z	3.647	5.205	2.765	3.968	3.185
Asymp. Sig	. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
a. Test distribution is Normal.						

Lampiran 6

Uji Heterokedasititas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.099E7	2.409E7		3.362	.001
PAJAK	.000	.000	.093	.947	.344
RETRIBUSI	-.001	.001	-.098	-1.121	.264
LABA_BUMD	.000	.003	-.008	-.109	.913
LAIN_LAIN_PAD	.000	.001	-.120	-1.511	.132

a. Dependent Variable: ABS

Lampiran 7

Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.560E7	2.482E7		-1.837	.067		
PAJAK	1.000	.000	.677	3.023E3	.000	.434	2.304
RETRIB USI	1.001	.001	.167	834.072	.000	.545	1.835
LABA_B UMD	1.000	.003	.061	379.879	.000	.856	1.168
LAIN_LA IN_PAD	1.001	.001	.283	1.566E3	.000	.665	1.504

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-4.560E7	2.482E7		-1.837	.067		
PAJAK	1.000	.000	.677	3.023E3	.000	.434	2.304
RETRIB USI	1.001	.001	.167	834.072	.000	.545	1.835
LABA_B UMD	1.000	.003	.061	379.879	.000	.856	1.168
LAIN_LA IN_PAD	1.001	.001	.283	1.566E3	.000	.665	1.504

a. Dependent Variable:

PAD

Lampiran 8**Uji Autokorelasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	1.000	1.000	2.122E8	2.029

a. Predictors: (Constant), LAIN_LAIN_PAD, LABA_BUMD, RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Lampiran 9

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^d

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.070E24	4	5.176E23	1.150E7	.000 ^a
	Residual	1.053E19	234	4.501E16		
	Total	2.070E24	238			

a. Predictors: (Constant), LAIN_LAIN_PAD, LABA_BUMD, RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Lampiran 10

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 ^a	1.000	1.000	2.122E8

a. Predictors: (Constant), LAIN_LAIN_PAD, LABA_BUMD, RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Lampiran 11


Uji Signifikansi-t

Coefficients^a




Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.560E7	2.482E7		-1.837	.067
	PAJAK	1.000	.000	.677	3.023E3	.000
	RETRIBUSI	1.001	.001	.167	834.072	.000
	LABA_BUM D	1.000	.003	.061	379.879	.000
	LAIN_LAIN_ PAD	1.001	.001	.283	1.566E3	.000

a. Dependent Variable: PAD

Daftar Riwayat Hidup

<i>Nama</i>	: <i>Luzy Okta Dila</i>	
<i>Npm</i>	: <i>C1C010019</i>	
<i>Fak/jur/Univ</i>	: <i>Ekonomi S1 Akuntansi Universitas Bengkulu</i>	
<i>Kelas/Angkatan</i>	: <i>A/ 2010</i>	
<i>Tempat/tgl Lahir</i>	: <i>Bengkulu, 16 Oktober 1991</i>	
<i>Jenis kelamin</i>	: <i>Perempuan</i>	
<i>Agama</i>	: <i>Islam</i>	
<i>Email</i>	: <i>Luzyoktadila@rocketmail.com</i>	
<i>Alamat</i>	: <i>Jalan danau 1 rt 6 rw 2 no.25 jembatan kecil Bengkulu</i>	

Riwayat Pendidikan

 <i>Sekolah Dasar BENGKULU</i>	: <i>SD NEGERI 41</i>
 <i>SMP / MTS BENGKULU</i>	: <i>SMP NEGERI 4</i>
 <i>SMA / MAN BENGKULU</i>	: <i>SMA NEGERI 2</i>